

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Pengantar

Kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka membangun wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara mendorong investasi di daerahnya sering kali menimbulkan permasalahan. Ketika investasi di daerahnya meningkat pesat, pemerintah daerah seringkali lupa tentang kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah seringkali bertindak sebagai pelayan investor daripada melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi permasalahan antara masyarakat dengan suatu perusahaan dimana pemerintah daerah terlihat enggan untuk membuat kebijakan yang melindungi masyarakat. Respon dari pemerintah daerah yang tidak cepat ini seringkali menimbulkan konflik di masyarakat.

2.2. Kerangka Teori

Bagian ini mengemukakan beberapa teori tentang konflik, isu-isu yang didiskusikan mencakup, Konsep Desentralisasi/Otonomi, Konsep Jaringan Sosial, Definisi Konflik, Teori Konflik, Sumber Konflik, Analisa Konflik, Dinamika Konflik dan Pengelolaan Konflik. Teori-teori ini akan dijadikan dasar untuk menganalisa adanya konflik antara masyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) di kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

2.3. Konsep Desentralisasi/Otonomi

Perubahan kebijakan didalam sistem pemerintahan daerah dimana dimasa orde lama dan orde baru kebijakan pemerintahan bersifat sentralistik

sekarang pemerintah daerah diberikan otonomi atau keleluasaan didalam mengelola pemerintahan daerahnya. Pada masa orde lama dan orde baru pemerintah daerah hanya dijadikan obyek kebijakan dari pemerintah pusat dimana hampir semua kebijakan pemerintahan ditentukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi/otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah-daerah di tingkat I maupun tingkat II di seluruh wilayah Indonesia untuk mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing. Otonomi daerah atau desentralisasi akan memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah ataupun pemerintahan nasional. Menurut Shabbir Cheema and Rondinelli (1983, pp.14-16) ada empat belas (14) alasan yang rasionalitas dari desentralisasi, yaitu:

1. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja dilapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang

lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistis dari pemerintah.

4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak difahami oleh masyarakat setempat atau dihambat elite lokal, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.

5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan didalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.

6. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga swasta di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat. Dengan desentralisasi maka peluang bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial.

7. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian, pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.

8. Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGOs di berbagai daerah, propinsi, kabupaten, dan kota dapat

menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah, khususnya di dunia ke III dimana banyak sekali program pedesaan yang dijalankan.

9. Stuktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Struktur seperti itu dapat merupakan wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut hubungan masing-masing daerah kemudian secara bersama-sama menyampaikan kepada pemerintah

10. Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktifitas yang dilakukan elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.

11. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh daerah lainnya.

12. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif ditengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat pusat.

13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah

untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.

14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada daerah.

Berlakunya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 tentang otonomi daerah ini membawa perubahan yang signifikan didalam proses pembangunan maupun pembuatan kebijakan pemerintah di daerah dimana selain mengurangi beban kerja pemerintah pusat, desentralisasi atau otonomi ini pemerintah daerah dengan adanya pelimpahan kewenangan selain kewenangan yang masih menjadi domain kewenangan pemerintah pusat banyak sekali inovasi dan kreatifitas yang muncul dari pemerintah-pemerintah yang ada di daerah didalam pembuatan kebijakan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakatnya. Didalam otonomi daerah terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi fokus perhatian utama yaitu, bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Bidang politik dengan adanya kebijakan desentralisasi dan demokrasi maka membuka peluang kontestasi sebagai pemimpin daerah bagi putra putri terbaik daerah untuk membangun dan memajukan daerahnya. Dengan terpilihnya pemimpin dari putra-putri terbaik daerah hendaknya mampu membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, responsif terhadap tuntutan masyarakat, transparan dan akuntabel. Dalam bidang ekonomi dengan adanya desentralisasi ini diharapkan pemerintah daerah selain menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional, di pihak lain pemerintah daerah harus

mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang ada diwilayahnya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola dengan baik untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan di waktu yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang positif.

2.4. Konsep Jaringan

Pakar analisis jaringan mengungkapkan dalam diri aktor yang masuk dalam lingkup suatu kelompok mempengaruhi masyarakat dalam setiap pola keteraturan sistemnya, dan harus memiliki keterikatan pola penyesuaian yang tepat dan mempelajarinya. Setelah menjelaskan apa yang menjadi bukti sasaran perhatiannya, teori jaringan lalu menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola objektif ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektifitas). Wellman mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan sebagai berikut: “Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindarkan penjelasan normatif dari perilaku sosial. Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam.”

Satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu (Wellman dan Wortley, 1990), tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan (Baker, 1990; Clawson, Neustadtl, dan Bearden, 1986; Mizruchi dan Koenig, 1986) dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi ditingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam

hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu (1985:490). Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektifitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar-aktor yang “tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok” (Wellman, 1983:169). Contoh yang baik dari ikatan seperti ini adalah diungkap dalam karya Granoveter (1973:1983) tentang “ikatan yang kuat dan lemah” Granoveter membedakan antar ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang lemah, misalnya hubungan antara seseorang dan kenalannya. Sosiolog cenderung memusatkan perhatian pada orang yang mempunyai ikatan yang kuat atau kelompok sosial. Mereka cenderung menganggap ikatan yang kuat itu penting, sedangkan ikatan yang lemah dianggap tak penting untuk dijadikan sasaran studi sosiologi. Granoveter menjelaskan bahwa ikatan yang lemah dapat menjadi sangat penting. Contoh, ikatan yang lemah antar dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isolasi ini selanjutnya dapat menyebabkan sistem sosial yang semakin terfragmentasi.

Seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat lebih luas. Karena itu ikatan yang lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat yang lebih luas. Meski Granoveter menekankan pentingnya ikatan yang lemah, ia segera menjelaskan bahwa “ikatan yang kuat pun mempunyai nilai” (1983:209; lihat Bian, 1997). Misalnya, orang yang mempunyai ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.

Jaringan politik keluarga yang ada dalam setiap dinamika politik lokal disebabkan adanya unsur relasi penguasa dengan suatu jaringan tersebut yang melihat pada perspektif kepentingan. Kepentingan aktor adalah salah satu kunci dalam membentuk sebuah relasi menuju sebuah pertukaran sosial. Terlepas dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori jaringan maka akan berkaitan dan berhubungan kuat akan adanya pertukaran dalam sebuah jejaring kekuasaan.

Emerson (1972a, 1972b) menyimpulkan bahwa teori pertukaran sosial terbatas oleh fokusnya pada dua orang, atau relasi pertukaran diadik (*dyadic*). Dengan memperlakukan relasi-relasi itu sebagai relasi yang saling berkaitan (*interconnected*), Emerson kemudian melangkah maju untuk melihat pertukaran sebagai sesuatu yang dilekatkan pada struktur jaringan yang lebih luas. Untuk melihat penjelasan tersebut maka jaringan yang akan menemukan persaingan maka harus diperkuat dengan pola struktur kekuasaan yang ada saat ini, karena

dengan adanya hal tersebut maka jaringan memiliki pola-pola yang kuat dan sistematis.

Melihat bagaimana jaringan tersebut mampu semakin kokoh dalam berproses pada struktur kekuasaan yang lebih lama maka, penulis coba bandingkan teori Cook tentang jaringan menurutnya. Menurutya, salah satu alasan untuk mengaitkan teori pertukaran dengan analisis jaringan adalah agar dapat bergerak melampaui analisis kekuasaan di dalam relasi diadik (*dyadic*) dan dapat menganalisa distribusi kekuasaan dalam jaringan secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu topik paling penting dalam teori pertukaran jaringan kontemporer. Dalam salah satu upaya yang pertama untuk melihat pada distribusi kekuasaan dalam jaringan, Cook dan rekannya (1983) mengembangkan teori “*vulnerability*”. Mereka mengatakan bahwa determinasi kekuasaan dari suatu posisi adalah didasarkan pada banyaknya ketergantungan seluruh struktur kepada posisi itu. Menurut mereka, ketergantungan pada sistem yang luas ini adalah fungsi dari sentralitas struktural dari posisi tersebut dan sifat relasi kekuasaan-ketergantungan. Dengan kata lain, *vulnerability* melibatkan ketergantungan jaringan kepada posisi struktural tertentu.

2.4. Teori konflik

Definisi konflik menurut kamus bahasa indonesia yang disusun oleh Poerwodarminto(1976), konflik berarti pertentangan atau percekocan. Pertentangan sendiri dapat terjadi ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak yang berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006:7), sehingga secara sederhana konflik dapat dijelaskan sebagai pertentangan yang

ditandai oleh pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi persinggungan(Susan,2009)

Definisi konflik menurut Webster(1996) dalam bahasa aslinya “*Conflict*” berarti suatu “perkelahian,pertentangan atau perjuangan “,yaitu konfrontasi fisik antara beberapa pihak,tetapi makna ini berkembang dengan masuknya:ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide dan lain-lain”.Dengan kata lain istilah tersebut juga sering menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi,selain konfrontasi fisik itu sendiri(Pruit & Rubin,1986)

Mengambil makna terbatas dari definisi Webster yang kedua, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan(*percieved divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan(Pruit & Rubin,!986)

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali sering dikaitkan dengan kekerasan,seperti kerusuhan,kudeta,terorisme dan revolusi.Pengertia konflik dengan berjalannya masa berkembang dimana konflik bukan hanya kekerasan secara fisik tetapi konflik berkembang lebih luas lagi dimana konflik itu mengandung pengertian “benturan”,seperti perbedaan pendapat,persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu,kelompok dengan kelompok dan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan pemerintah(Surbakti,1992).

Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Percieved divergenceof interest*).Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan.Beberapa kepentingan bersifat universal seperti

kebutuhan akan rasa aman, identitas, "restu sosial" (*social approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu (misalnya keinginan bangsa Palestina untuk memiliki tanah air) beberapa kepentingan bersifat lebih penting (memiliki prioritas yang lebih tinggi) daripada yang lain, dan tingkat prioritas tersebut berbeda pada masing-masing orang (Pruitt & Rubin, 1986).

Konflik merupakan salah satu barometer penting dalam melihat dinamika suatu masyarakat. Konflik bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai bentuk relasi yang bersifat negatif, destruktif, atau kontraproduktif, padahal dalam masyarakat yang berkembang ke arah penguatan *civil society*, konflik dalam masyarakat selalu dianggap sebagai bagian yang melekat dalam perkembangan masyarakat modern. Konflik antarkelompok dalam masyarakat dengan negara hendaknya dipahami sebagai suatu sinergi yang diperlukan bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum pendekatan konflik yang seringkali digunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua, yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Marx memandang masyarakat terdiri atas dua kelas yang berdasarkan pemilikan dan alat produksi (*Property*) yaitu kelas borjuis atau yang sering dikenal orang-orang kaya yang memiliki modal dan kelas proletar atau yang sering disebut orang miskin/melarat dalam hal ini adalah para buruh. Menurut Karl Marx masyarakat disini terintegrasi karena adanya struktur kelas yang dominan yang menggunakan negara dan hukum sebagai alatnya, sedangkan pendekatan yang kedua sebagaimana dikemukakan oleh Ralf

Dahrendorf, melihat masyarakat terdiri dari dua kelas berdasarkan pemilikan kewenangan (*authority*) yaitu kelas yang memiliki kewenangan (dominasi) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (*subyeksi*).

Beberapa asumsi atau anggapan dasar teori konflik : pertama setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan, perubahan sosial merupakan gejala yang inheren (melekat) dalam setiap masyarakat ,kedua setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya, konflik merupakan gejala yang melekat dalam masyarakat, ketiga setiap unsur dalam setiap masyarakat memberi andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan keempat setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain (Surbakti, tanpa tahun).

Wallace dan Wolf (1995) yang dikutip oleh Susan (2009) bahwa ada tiga prinsip utama dalam sosiologi konflik Karl Mark yaitu pertama manusia secara alamiah memiliki angka kepentingan, jika seseorang bertindak tidak diatas kepentingan alamiah tersebut berarti mereka telah dicurangi dari kepentingan sebenarnya (*true interest*). Kedua konflik dalam sejarah dan masyarakat kontemporer adalah akibat benturan kepentingan kelompok-kelompok sosial, ketiga melihat keterkaitan ideologi dan kepentingan. Menurut Karl Mark gagasan dari suatu jaman adalah refleksi dari kepentingan "*rulling class*"

Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi kepemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas. Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki

sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya, Dahrendorf menganggap bahwa secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi kekuasaan, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung didalamnya (Wikipedia).

Tedd Robert Gurr menyebutkan ada empat ciri konflik yaitu: (1) Ada dua atau lebih pihak yang terlibat (2) Mereka terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi (3) Mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) Interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen (Rauf, 2001)

Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju arah kesepakatan (consensus). Selain itu masyarakat tidak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan sebaliknya masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun tidak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi konflik dan konsensus merupakan gejala yang tidak terelakkan dalam masyarakat (Surbakti, 1992)

Konflik dapat terjadi dalam skala yang berbeda-beda seperti konflik antar orang (*interpersonal konflik*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*),

konflik antar kelompok dengan Negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala konflik memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arifksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak mengahdirkan kekkerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan seperti perang dan pembantaian (Susan, 2009).

Menurut Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai “*Integrated into a common frame of reference*”; lebih lanjut ia menjelaskan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Dahrendorf, 1959 : 164-165 dalam Susan, 2009). Susan (2009) juga menyebutkan bahwa Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur-struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan : Kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari asal kemungkinan itu menyerah (Dahrendorf 1959: 164-165).

Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industri bisa diterjemahkan sebagai wewenang (*authority*). Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebutkan wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan modern (Susan, 2009). Dahrendorf sebagaimana dikutip oleh Susan (2009) melihat

wewenang adalah (1) Relasi wewenang yaitu relasi-relasi antar super dan subordinasi;(2) Dimana ada relasi-relasi wewenang , kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok-kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan;(3)Berbagai harapan tertanam relative permanen (4) Dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan ordinasi,penulis) mereka selalu melibatkan spesifikasi subyek-subyek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang kontrol mungkin dilakukan; dan (5) Wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi, sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi (Dahrendorf,1959: 166-167).Dahrendorf merumuskan teori konfliknya dengan mengatakan bahwa konflik timbul dalam masyarakat karena adanya pembagian kewenangan yang tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya dua macam kategori sosial dalam masyarakat yaitu mereka yang memiliki kewenangan dan mereka yang tidak memiliki kewenangan. Kelas yang mempunyai kewenangan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kelas yang tidak mempunyai kewenangan. Kepentingan yang obyektif adalah kepentingan yang melekat pada peran sosial atau jabatan,se sedangkan kepentingan orang yang tidak mempunyai kewenangan adalah merubah atau menentang status quo hubungan kewenangan itu(Surbakti,tanpa tahun).

Ketika kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain,kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan kedalam suatu aspirasi,yang didalamnya terkandung tujuan dan standar. Tujuan akhir adalah

akhir yang kurang lebih tepat adalah arah yang diperjuangkan oleh seseorang, sedangkan standar adalah tingkat pencapaian minimal yang bila lebih rendah daripadanya orang akan menganggapnya tidak memadai. Aspirasi aspirasi ini harus dianggap tidak sesuai dengan aspirasi-aspirasi pihak lain, jadi suatu pihak harus mempersepsikan bahwa pemuasan aspirasinya sendiri menghalangi pemuasan pihak lain, dan begitu sebaliknya, semakin besar ketidaksesuaian ini semakin besar pula perbedaan kepentingan ini akan dipersepsi (Pruit & Rubin, 1986)

Menurut Lewis A. Coser Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam

masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti telur, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresi. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan non-realistik) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan.

Coser membuat suatu konsep yaitu katup penyelamat yang berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (*safety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur.

Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik *in-group* merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser mempunyai pandangan yang berbeda dengan ahli sosiologi yang lain dimana ia sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya

dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan

2.5.Sumber Konflik

Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik yaitu mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat material-jasmaniah maupun spiritual-rohaniyah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya (Surbakti, 1992).

Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki (Surbakti, 1992).

Para penganut pendekatan konflik mengatakan bahwa setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo dari pola hubungan kekuasaan yang ada, dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk mengubah atau merubah

status-quo dari pola hubungan-hubungan tersebut. Karena kepentingan-kepentingan yang demikian tidak selalu disadari adanya maka ia disebut sebagai kepentingan-kepentingan yang bersifat laten (*latens interest*), sementara mereka yang memilikinya disebut sebagai kelompok semu (*quasi-groups*) mengingat kenyataan bahwa pola hubungan-hubungan sosial yang berkembang diantaranya para anggota terbentuk melalui proses yang mereka tidak sadari (Nasikun, 2005).

2.6. Analisis Konflik

Pada hakekatnya analisis konflik terbagi menjadi dua tradisi pemikiran orientasi akan tetapi mereka dihubungkan oleh tiga asumsi umum yang menghubungkannya (Wallace & Wolf, 1986: 62-63,; Pertama bahwa setiap orang mempunyai angka dasar kepentingan, mereka ingin dan mencoba mendapatkannya, dimana masyarakat selalu terlibat dalam situasi yang diciptakan oleh keinginan-keinginan dari setiap orang dalam meraih kepentingannya. Kedua, dan pusat pada perspektif teori konflik secara keseluruhan, adalah satu pemusatan perhatian pada kekuasaan pada sebagai inti hubungan sosial. Teori konflik selalu melihat kekuasaan tidak hanya sebagai kelangkaan dan pembagian tidak merata, dan oleh sebab itu satu sumber konflik, dan juga sebagai paksaan penting. Ketiga aspek khusus teori konflik adalah bahwa nilai dan ide-ide dilihat sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok-kelompok berbeda mempermudah tujuan mereka, daripada sebagai cara-cara pendefinisian satu identitas masyarakat keseluruhan dan tujuannya.

Analisis konflik pragmatis bisa meliputi tehnik pemetaan konflik, jenis dan tipe konflik, dinamika dan intervensi konflik, analisis konflik pragmatis merupakan alat analisis sederhana untuk menganalisa konflik secara umum. Perspektif analisis

bisa dimasukkan didalamnya sesuai dengan kepentingan peneliti (Susan,2009).Menurut Fisher pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak yang berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada.Pemetaan merupakan suatu tehnik yang digunakan untuk menggambarkan secara grafis,menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak yang lain.Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang yang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing(Fisher,2001 : 22 dalam susan,2009).Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula.Metode memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik dan juga digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan pada para peserta sebuah gambaran konflik yang sedang diamati.Setiap peta konflik tertentu harus dipahami mewakili pandangan pengarang, dan sebagai sebuah skema, lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh (Mial,Romsbotham dan Wood,2003).Seperti yang dikemukakan Bartos dan Wehr(2002), disaat konflik muncul,akan menimbulkan kebimbangan. Interaksi antar pihak yang berkonflik berubah secara radikal dan tiba-tiba.Ketidakpastian (*unpredictable*, ketidakpastian (*uncertainty*) dan emosi cenderung meningkat. Keputusan yang tidak bijaksana dan mahal sering dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi.Karena seberapa besar konflik itu muncul akan menentukan pula seberapa besar/mahal konsekuensinya kemudian,tentu membutuhkan pemahaman yang tentang kemungkinan yang paling tepat tentang apa yang terjadi disaat konflik itu muncul.

Konflik antar personal mempunyai beberapa elemen, apalagi konflik yang melibatkan multi- pihak (*multiple-parties*), melibatkan orang dalam jumlah yang besar dan banyak organisasi yang beragam tentu akan menambah kerumitan elemen konflik tersebut. Untuk memahaminya, kita memerlukan analisis yang sesuai. Untuk itulah konsep pemetaan konflik (*conflict mapping*) digunakan untuk membantu mengklarifikasi kebimbangan yang muncul akibat konflik.

Setiap konflik memiliki elemen dasar tertentu yang mengarahkan kita membuat sebuah peta –jalan (*road-map*), sehingga para pihak yang berkonflik itu akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Menurut Burton dan Wehr (2002) langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Specify the context* (Menspesifikasikan konteks pada konflik)

Pemeta/peneliti (*mapper*) pertamakali harus mengumpulkan informasi tentang kronologi konflik, dengan latar belakang secara fisik maupun organisasi. Konflik tidak selalu muncul dalam satu garis/ruang, akan tetapi kadang bisa bercang atau tumpang tindih satu sama lain. Sebagai contoh, sebuah konflik keluarga seperti masalah finansial, mungkin akan menjadi konflik yang lebih luas, seperti komitmen yang bagaimana dalam membesarkan anak, bagaimana memanfaatkan waktu luang, dan siapa yang harus membuat keputusan utama dalam konflik tersebut.

2. *Identify the parties* (mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik)

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan berbeda dalam cara sejauh mana mereka terlibat secara langsung dan seberapa penting pengaruh konflik ini bagi mereka. Pihak utama yang terlibat konflik adalah mereka

yang secara langsung saling berlawanan, yang menggunakan perilaku yang cenderung memaksakan kehendak dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap hasil pemecahan konflik. Pihak kedua merupakan pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak langsung terhadap hasil pemecahan konflik. Sedangkan pihak ketiga adalah aktor yang bertindak sebagai mediator dan “pasukan penjaga perdamaian” yang mungkin mengintervensi dalam memfasilitasi resolusi

3. *Separate cause from consequences* (Memisahkan antara penyebab dan konsekuensi),. Membedakan suatu penyebab dari suatu konflik dengan konsekuensi dari konflik tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Pada kenyataannya, disaat sebuah konflik muncul, penyebab dan konsekuensi akan cenderung bercampuraduk (*blend*). Permusuhan mungkin akan menjadi konsekuensi dari fase pada sebuah konflik dan menjadi penyebab terjadinya fase berikutnya. Ketidaksesuaian tentang tujuan dan pokok perhatian pada suatu konflik mungkin merupakan penyebab utama pada konflik sosial. Mempertahankan identitas diri sering mengarahkan pada ketidakcocokan yang sering terjadi pada masa kini, dimana kesadaran dan hak asasi kelompok mulai selalu nampak. Perbedaan kepercayaan dan nilai menjadi penyebab yang sering muncul pada konflik sosial. Keragaman itu mulai dari image negatif lawan hingga opini tentang supremasi kekuasaan. Ketidaksepakatan tentang kekuasaan menjadi ciri dari banyak konflik dan merupakan aspek yang paling siap untuk diselesaikan dalam konflik. Dan kemudian konflik berikutnya yang muncul disebabkan karena

satu atau dua pihak memang ingin berkelahi, tanpa memandang apapun masalahnya, dengan sendirinya konflik merupakan suatu tujuan.

4. *Separate goals from interest* (Memisahkan tujuan dari kepentingan). Ada perbedaan penting secara teori maupun praktek antara tujuan dan minat/ketertarikan. Goal/tujuan biasanya dialamatkan sebagai sasaran (obyektif) dari sebuah pihak dalam konflik. Kadang kata goal/tujuan tersebut dimaknakan sebagai suatu posisi, dan tuntutan khusus yang dibuat oleh satu pihak atau lainnya. Sedangkan kepentingan (*interest*) adalah seluruh hasil (konsekuensi –konsekuensi) yang mempunyai balikan positif/keuntungan bagi pihak tersebut. Dalam prakteknya, kepentingan merupakan suatu hasil yang akan dicapai dan sudah ditentukan sebelumnya dan benar-benar menjadi motivasi dari pihak tersebut, yaitu sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu rasa aman (*security*), pengakuan (*recognition*), penghargaan (*respect*) dan seterusnya (Burton, 1990)
5. *Understand of dynamics* (Memahami dinamika). Suatu konflik akan secara konstan selalu bergerak dan berubah. Meskipun pihak yang bertikai menemui jalan buntu, beberapa aspek dari konflik akan berubah juga. "Runaway response" (Coleman, 1957) respon menjauhi dari pihak yang bertikai ini lebih mudah dilihat melalui pemetaan konflik. Dinamika seperti eskalasi dan polarisasi yang bebas menjauhkan pihak yang terlibat konflik dari resolusi kooperatif menuju pertikaian yang lebih besar. Perubahan persepsi pada sisi yang berlawanan akan mendorong

respon menjauhi: mencap lawan, melihat mereka sebagai cermin negatif dan meningkatkan motif sinisme.

6. *Search for positive function*, (Mencari fungsi positif). Sebuah fungsi positif dari sebuah konflik adalah sebagai konsekuensi yang memiliki balikan positif bagi para pihak yang berkonflik. Pada beberapa kasus, fungsi positif ini secara terbuka diupayakan oleh satu pihak, sehingga menjadi tujuan dari pihak tersebut. Pada kasus lain, fungsi positif ini mungkin dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau rangsangan agresif atau bahkan mungkin Cuma diusulkan. Dengan begitu perjuangan sebuah keluarga atas masalah finansial mungkin bertindak menjadi beberapa fungsi : menguatkan kekuasaan istri untuk mengambil keputusan membuat anak-anak lebih independen, mengajak suami agar berperilaku masuk akal pada keluarganya. Memahami fungsi positif mengarahkan untuk menempuh cara-cara bagaimana para pihak mencapai tujuan daripada fokus pada konflik.

7. *Understand the regulation potential* (Memahami potensi dari regulasi)

Setiap konteks konflik berisi elemen yang membatasi konflik itu sendiri, disini memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Faktor internal yang membatasi seperti keinginan sederhana dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka dapat digunakan. Sedangkan faktor eksternal yang membatasi seperti hukum dan otoritas yang lebih tinggi mungkin juga perlu diperkenalkan.

Ketika pemetaan konflik telah dilakukan langkah berikutnya adalah menganalisa dinamika konflik. Salah satu faktor yang sangat penting dalam

memahami dinamika konflik adalah dengan melihat sumber konflik, yaitu segala sesuatu yang menjadi inti masalah, seperti sumber daya alam, perbedaan tafsir agama atau etnis. Kemudian setelah melihat sumber konflik kita perlu menganalisis karakter hubungan (*relationship*) diantara pihak berkonflik. Karakter hubungan konflik ini bisa memanfaatkan beberapa perspektif sosiologi konflik, baik positivis, kritis dan humanis. Secara umum, ketiga mazhab sosiologi konflik mengacu pada hubungan kekuasaan yang berbeda. Sehingga menjadi penting bagi seseorang analisis konflik melihat model hubungan kekuasaan yang ada. Seperti pihak A adalah pekerja dari pihak B, atau pihak B adalah organisasi pemerintah dan pihak A adalah warga. Melalui analisis model hubungan kekuasaan ini akan diperoleh model tindakan yang muncul, apakah *coercive action* atau *non coercive action* (Susan, 2009).

2.7. Dinamika Konflik

Tingkat tindakan koersif ketika berada dalam suatu hubungan konflik akan mencipta dinamika konflik. Dinamika konflik ditandai terlebih dahulu oleh fase-fase konflik. Wehr dan Bartos (2003:72-78), membagi konflik menjadi dua fase yaitu fase solidaritas konflik (*conflict solidarity*) dan fase sumber-sumber konflik (*conflict resources*). Solidaritas konflik adalah terciptanya konflik menuju kompleksitas melalui keterlibatan individu-individu yang lain. Proses ini berlangsung melalui tiga proses yaitu terdapat interaksi individu-individu anggota secara intensif, ada rasa suka terhadap anggota yang lain, dan jika terdapat kesamaan (kemiripan) kepercayaan (keyakinan), nilai-nilai dan norma. Ketiga proses ini akan teraktualisasikan, dipicu oleh adanya fakta kekejian (*hostility*). Ada dua bentuk kekejian, yaitu frustrasi dan keluhan (*grievances*). Solidaritas

konflik dicirikan oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin dan semangat perlawanan. Selanjutnya terdapat pengorganisasian anggota dan struktur sehingga bisa dirumuskan berbagai strategi konflik. Kemudian yang terakhir adalah mobilisasi massa dengan mengefektifkan seluruh sumber dayanya untuk memenangkan konflik.

Fase selanjutnya adalah sumber konflik, yaitu proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrument tertentu untuk menghadapi konflik. Misalnya satu negara hendak berperang dengan negara lain maka yang dibutuhkan adalah tentara, peralatan tempur dan logistik. (Wehr dan Bartos 2003 :78 dalam Susan, 2009)

Dahrendorf (1959) dalam Pruitt & Rubin (1986) menyebutkan tiga kondisi yang mendukung kemunculan sebuah struggle group, yang sering kali muncul sebagai pendorong terjadinya konflik, yaitu (1) komunikasi terus menerus diantara orang-orang senasib; (2) adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok; (3) legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.

Beberapa bentuk dan tingkatan intervensi konflik. Pertama adalah peace making (menciptakan perdamaian) yang biasa muncul dalam bentuk intervensi militer. Dinamika konflik biasanya berada pada puncak eskalasi yang ditandai oleh reproduksi aksi kekerasan, mobilisasi massa dan tidak adanya komitmen menghentikan konflik kekerasan. Kedua adalah peace keeping (menjaga perdamaian) yang juga muncul dalam intervensi militer agar pihak yang sudah

tidak bertikai tidak kembali melakukan aksi kekerasan bukan dilandasi oleh pemecahan masalah, namun akibat melemahnya atau habisnya sumber daya bertempur. Ketiga adalah *conflict management* (pengelolaan konflik) yang mulai menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah. Beberapa tindakan pengelolaan konflik ini bisa dalam bentuk negosiasi, mediasi penyelesaian jalur hukum (*judicial settlement*) arbitrase dan workshop pemecahan masalah. Keempat adalah *peace building* (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai.

2.8. Pengelolaan Konflik

Menurut para penganut teori konflik Dahrendorf, konflik yang banyak terjadi di masyarakat terjadi karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata sehingga bertambahnya kewenangan pada satu pihak dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Surbakti (tanpa tahun) mengatakan bahwa para penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala yang serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak dapat dienyapkan. Yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik (*conflict regulation*) itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.

Pengaturan konflik yang efektif menurut Dahrendorf dalam Surbakti (1992), pengaturan konflik bergantung pada tiga faktor. Pertama kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain). Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi,

tidak tercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga kedua belah pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka.

